

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi di Indonesia pasca-reformasi 1998 telah membuka ruang partisipasi politik yang semakin luas bagi masyarakat. Pemilihan umum, baik di tingkat nasional maupun daerah, menjadi mekanisme utama dalam menentukan kepemimpinan politik. Namun, praktik demokrasi elektoral di tingkat lokal tidak pernah sepenuhnya steril dari pola-pola hubungan sosial yang bersifat tradisional maupun relasi kuasa yang asimetris. Salah satu pola yang paling menonjol adalah patronase politik, yaitu hubungan timbal balik antara aktor yang memiliki sumber daya (patron) dengan masyarakat yang membutuhkan perlindungan maupun akses ekonomi (klien). Dalam praktiknya, patronase ini tidak hanya berbasis politik, melainkan juga erat kaitannya dengan struktur ekonomi lokal yang berkembang di suatu daerah.

Kabupaten Wajo sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang cukup khas. Wajo dikenal sebagai daerah agraris dengan basis perekonomian masyarakat yang sangat bergantung pada sektor perkebunan, salah satunya komoditas cengkeh. Cengkeh bukan hanya bernilai ekonomis, tetapi juga membentuk relasi sosial yang khas antara petani dengan pedagang pengumpul atau yang dikenal dengan istilah juragan cengkeh. Para juragan ini memiliki posisi yang sangat strategis, karena mereka bukan hanya menguasai permodalan dan akses pasar, tetapi juga memiliki hubungan yang kuat dengan para petani melalui praktik utang musiman, sistem ijon, hingga fasilitas pembelian hasil panen. Dengan demikian, juragan cengkeh tidak hanya berperan sebagai aktor ekonomi, tetapi juga sebagai patron sosial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat pedesaan.

Dalam konteks politik lokal, terutama pada momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, peran juragan cengkeh menjadi semakin penting. Juragan tidak sekadar menjadi pelaku ekonomi, melainkan juga bertindak sebagai broker politik yang menjembatani kepentingan calon kepala daerah dengan masyarakat basis. Hubungan patron-klien yang terbangun melalui ketergantungan ekonomi membuat juragan memiliki daya tawar yang kuat untuk mengarahkan pilihan politik para petani. Juragan sering kali mampu mengkonsolidasikan suara dalam jumlah besar karena posisinya sebagai tokoh ekonomi yang juga dipercaya secara sosial.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kontestasi politik di tingkat lokal tidak dapat dilepaskan dari jejaring ekonomi-politik yang dijalankan oleh aktor non-formal, salah satunya juragan cengkeh.

Di sisi lain, politik lokal di Wajo memperlihatkan bagaimana ketidakpastian harga cengkeh menjadi ruang negosiasi antara petani, juragan, dan kandidat politik. Fluktuasi harga yang tajam membuat petani cenderung mencari jaminan keamanan ekonomi, yang salah satunya diwujudkan melalui kedekatan dengan juragan. Pada saat yang sama, juragan dapat memanfaatkan posisi strategisnya untuk memperoleh akses dan keuntungan politik, misalnya melalui dukungan kandidat tertentu yang menjanjikan kebijakan stabilisasi harga atau program bantuan bagi petani cengkeh. Dengan kata lain, patronase ekonomi yang dibangun dalam rantai tata niaga cengkeh bertransformasi menjadi patronase politik yang berimplikasi langsung pada perilaku pemilih.

Fenomena patronase ini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari budaya politik masyarakat Bugis, yang masih menempatkan solidaritas kekerabatan, penghormatan terhadap figur, dan prinsip *Siri' na Pacce* (harga diri dan solidaritas sosial) sebagai nilai penting. Juragan cengkeh yang dermawan, membantu masyarakat dalam masa sulit, atau memberi pinjaman di saat panen gagal, akan dianggap sebagai figur yang layak dihormati. Oleh karena itu, ketika juragan memberikan arahan politik, banyak petani yang secara sukarela mengikuti, bukan hanya karena keterikatan ekonomi, tetapi juga karena adanya kewajiban moral untuk membalas kebaikan (utang budi). Inilah yang membuat patronase ekonomi tidak sekadar bersifat transaksional, tetapi juga melekat dalam relasi sosial yang lebih luas.

Selain itu, dalam praktik kontestasi politik, juragan cengkeh juga sering dilibatkan secara langsung oleh tim pemenangan kandidat. Juragan berperan mengorganisasi massa, menyediakan logistik, bahkan menyalurkan kampanye secara terselubung. Hal ini menunjukkan bahwa juragan tidak hanya memobilisasi dukungan berdasarkan pengaruh pribadi, tetapi juga menjadi aktor institusional dalam strategi pemenangan politik. Dengan demikian, studi mengenai pengaruh juragan cengkeh dalam politik lokal di Kabupaten Wajo tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga relevan secara praktis dalam memahami dinamika demokrasi elektoral di daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian yang telah disampaikan diatas dan berdasarkan latar belakang masalah dan luasnya cakupan judul, maka penulis membatasi dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana bentuk-bentuk patronase ekonomi yang dijalankan oleh juragan cengkeh terhadap petani dan pekerja cengkeh di Kabupaten Wajo?
2. Melalui mekanisme apa patronase ekonomi tersebut memengaruhi partisipasi politik petani dan pekerja cengkeh dalam Pilkada 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan peran juragan cengkeh sebagai patron ekonomi yang berpengaruh terhadap perilaku politik masyarakat.
2. Menganalisis bentuk-bentuk patronase ekonomi yang berubah menjadi patronase politik di Kabupaten Wajo.
3. Menggambarkan bagaimana keterlibatan juragan cengkeh dapat mempengaruhi kemenangan calon bupati pada Pilkada 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur patron-klien dan klienelisme elektorat dengan kasus komoditas spesifik.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah, dinas terkait dalam menata program yang mengurangi ketergantungan asimetris.

1.5 Kajian Teori

Penelitian ini menggunakan teori orang kuat lokal (local strongman) sebagai kerangka analisis utama. Teori ini digunakan untuk memahami keberadaan aktor informal di tingkat lokal yang memiliki pengaruh dan kontrol sosial yang kuat meskipun tidak berada dalam struktur kekuasaan formal. Dalam konteks penelitian ini, juragan cengkeh dipahami sebagai orang kuat lokal yang menguasai sumber daya ekonomi, membangun legitimasi sosial, serta mampu memobilisasi dukungan politik masyarakat melalui relasi personal yang berkelanjutan dan dilegitimasi oleh norma sosial serta budaya lokal.

Konsep lokal strongman dari Joel S. Migdal digunakan untuk menjelaskan posisi juragan cengkeh sebagai aktor informal yang memiliki pengaruh besar meskipun berada di luar struktur kekuasaan formal negara. Juragan cengkeh mampu mengontrol sumber daya, memobilisasi dukungan, serta menjalin relasi dengan aktor negara dan kandidat politik.

Teori orang kuat lokal (local strongman) digunakan untuk menjelaskan keberadaan aktor-aktor informal di tingkat lokal yang memiliki pengaruh dan kontrol sosial yang kuat, meskipun tidak berada dalam struktur kekuasaan formal negara. Joel S. Migdal (2001) menjelaskan bahwa dalam masyarakat dengan kapasitas negara yang lemah, kekuasaan tidak sepenuhnya dimonopoli oleh negara, melainkan terfragmentasi ke dalam berbagai kelompok dan aktor lokal yang mampu mengendalikan sumber daya serta membangun kepatuhan sosial. Aktor-aktor inilah yang kemudian dikenal sebagai local strongman.

Local strongman memperoleh kekuasaannya bukan melalui jabatan resmi, melainkan melalui penguasaan atas sumber daya strategis, jaringan sosial, serta legitimasi yang dibangun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Mereka hadir sebagai figur yang mampu menyediakan perlindungan, bantuan ekonomi, dan solusi atas persoalan hidup masyarakat, sehingga memperoleh pengakuan dan kepatuhan sosial. Dalam konteks ini, relasi yang terbentuk antara orang kuat lokal dan masyarakat bersifat tidak seimbang, tetapi tetap bertahan karena dianggap memberikan rasa aman dan kepastian bagi kedua belah pihak.

Dalam praktik politik lokal, keberadaan local strongman sering kali berkaitan erat dengan mekanisme patronase. Namun, dalam kerangka local strongman, patronase tidak dipahami sekadar sebagai pertukaran material jangka pendek, melainkan sebagai bagian dari strategi kontrol sosial yang berkelanjutan. Migdal menyebut bahwa orang kuat lokal mampu

memelihara dominasinya melalui apa yang disebut sebagai *strategies of survival*, yakni praktik-praktik sosial dan ekonomi yang membuat masyarakat bergantung dan sulit melepaskan diri dari pengaruhnya.

Sejumlah penelitian mengenai *local strongman* di Indonesia menunjukkan bahwa aktor-aktor ini memainkan peran penting dalam kontestasi politik lokal. Hadiz (2010) menjelaskan bahwa desentralisasi justru membuka ruang yang lebih luas bagi menguatnya orang-orang kuat lokal yang mampu menggabungkan kekuasaan ekonomi, jaringan sosial, dan pengaruh politik. Dalam kondisi ini, proses demokrasi elektoral sering kali dipengaruhi oleh aktor informal yang berperan sebagai pengendali suara di tingkat akar rumput.

Dalam konteks masyarakat agraris, orang kuat lokal umumnya berasal dari kelompok yang menguasai sumber daya ekonomi utama, seperti tuan tanah, tengkulak, atau pedagang besar hasil pertanian. Mereka menjadi pusat ketergantungan masyarakat karena mampu menyediakan modal, akses pasar, dan bantuan pada saat krisis. Ketergantungan ekonomi ini kemudian berkembang menjadi kontrol sosial, di mana masyarakat cenderung mengikuti arahan dan keputusan orang kuat lokal, termasuk dalam ranah politik.

Fenomena tersebut tampak jelas dalam konteks Kabupaten Wajo melalui peran juragan cengkeh. Juragan cengkeh tidak hanya berfungsi sebagai pedagang yang membeli hasil panen, tetapi juga sebagai penyedia modal dan penopang ekonomi petani. Ketergantungan petani terhadap juragan menjadikan juragan memiliki posisi dominan dalam struktur sosial lokal. Posisi ini memungkinkan juragan berperan sebagai *local strongman* yang memiliki pengaruh luas tanpa harus menduduki jabatan politik formal.

Kekuatan juragan cengkeh sebagai orang kuat lokal juga diperkuat oleh nilai budaya masyarakat Bugis, seperti *Siri' na Pacce* dan ikatan utang budi. Nilai-nilai ini memperkuat legitimasi sosial juragan dan menciptakan kepatuhan yang bersifat moral, bukan koersif. Masyarakat merasa memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan baik dan mengikuti arahan juragan sebagai bentuk penghormatan dan balas budi atas bantuan yang telah diberikan.

Dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Wajo 2024, juragan cengkeh tampil sebagai aktor strategis yang berperan dalam memobilisasi dukungan politik masyarakat. Juragan berfungsi sebagai perantara antara kandidat

dan masyarakat basis, sekaligus sebagai pengarah preferensi politik petani. Peran ini menegaskan posisi juragan cengkeh sebagai local strongman yang mampu menghubungkan kepentingan elit politik dengan struktur sosial-ekonomi masyarakat lokal.

Dengan demikian, teori local strongman memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami bagaimana kekuasaan politik di tingkat lokal tidak hanya ditentukan oleh institusi formal, tetapi juga oleh aktor-aktor informal yang menguasai sumber daya, membangun legitimasi sosial, dan menjalankan kontrol sosial secara efektif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

1.5.1 Teori Orang Kuat Lokal (Local Strongman)

Kajian atau pemahaman mengenai eksistensi orang kuat merupakan konsekuensi langsung dari kajian tentang elit penguasa. Terutama tentang elit yang tidak memerintah langsung atau berkuasa di dalam struktur organisasi formal. Menurut Putnam, orang kuat adalah mereka yang tidak berada di posisi puncak sebuah struktur organisasi namun memiliki pengaruh dan kekuasaan penuh untuk menentukan atau memutuskan ketentuan yang berlaku dalam sebuah organisasi. Karena pengaruh kekuasaan serta reputasi yang dimiliki olehnya, orang kuat dapat memerintah dan mengarahkan elit yang berkuasa dalam hal ini adalah elit formal agar mengikuti semua hal yang sesuai dengan keputusan dan ketentuan orang kuat tersebut.

Joel S. Migdal mencoba menjelaskannya bahwa negara adalah bagian yang terintegrasi dengan masyarakat. Sifat yang dimiliki Negara tidak terlepas dari basis sifat masyarakat di dalamnya. Migdal mendefinisikan Negara sebagai organisasi besar yang hidup berdampingan dengan organisasi-organisasi lainnya diluar dirinya, yakni seperti organisasi-organisasi sosial formal dan informal. Eksistensi organisasi-organisasi informal di luar Negara pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan yang dapat mengurangi kapabilitas sebuah Negara sebagai satu-satunya alat pengontrol yang sah.

Local strongman merupakan konsekuensi langsung dari posisi negara yang melemah, yaitu ketika fungsi kontrol dan mengatur sebuah negara semakin lemah (weak state). Pada saat yang bersamaan, masyarakat dengan segala social capacity yang dimiliki semakin kuat. Mereka berhasil keluar dari dominasi sebuah

Negara, artinya masyarakat disini menjadi relatif lebih otonom di hadapan negara.

Meskipun eksistensi local strongman lebih banyak ditentukan oleh tingkat besarnya pengaruh yang dimiliki, namun eksistensi mereka juga sangat ditentukan oleh dukungan struktur negara. Migdal menyebutnya sebagai *triangle of accommodation*. Dominasi local strongman akan kurang maksimal ketika Negara tidak memberikan dukungan penuh pada mereka. Oleh karena itu, eksistensi mereka juga sangat tergantung atas kelihaian local strongman, ini untuk mendapatkan dukungan negara. Kolaborasi local strongman dan negara ini yang mendasari kuatnya pengaruh local strongman dalam masyarakat lokal. Untuk kepentingan negara, Negara rela memberikan fasilitas sekaligus mengontrol para local strongman.

Migdal memiliki tiga argumentasi yang saling berkaitan tentang local Strongman yaitu:

- a. Local Strongman tumbuh subur di dalam masyarakat mirip jaringan yang digambarkan sebagai sekumpulan campuran organisasi-organisasi sosial nyaris mandiri dengan kontrol sosial yang efektif terpecah-pecah pola kontrol sosial khusus terpecah-pecah ini, seringkali diakui menyatu dalam pemerintahan kolonial dan penyatuannya di dalam perkuburan kelas-kelas pemilik tanah besar. Berkat struktur masyarakat jaringan, orang kuat lokal memperoleh pengaruh signifikan jauh melampaui para pemimpin negara dan para birokrat lokal yang digambarkan migdal sebagai segitiga penyesuaian. Jadi secara ringkas, keberhasilan local strongman atau orang kuat lokal dalam mencapai distribusi dan pengakuan kontrol sosial mereka di masyarakat menurut Migdal, didasari atas tiga faktor utama.
 1. Pertama, karena sifat masyarakat yang berbentuk jejaring, dimana klientilisme tumbuh subur dan berkembang, Sehingga kontrol sosial terfragmentasi pada kekuatan-kekuatan yang ada, karena tidak mampu dimonopoli oleh negara.
 2. Kedua, karena proses akulturasi mitos “strategi bertahan hidup” yang ada dalam diri orang kuat lokal di masyarakat, dan sudah menjadi simbol tersendiri di

antara mereka. Dimana orang kuat menjadi satu-satunya tumpuan hidup masyarakat.

3. Dan ketiga, kemampuan orang kuat lokal mengintervensi, menembus dan menangkap lembaga-lembaga negara sehingga menjadikan negara jadi lemah, karena melalui semacam gangguan lewat berbagai tindakan koersif yang ditujukan pada birokrat-birokrat pemerintah.
- b. Local Strongman melakukan kontrol sosial dengan menyertakan beberapa komponen penting yang dinamakan (strategi bertahan hidup) penduduk setempat. Dengan kondisi seperti itu, orang kuat bukan saja memiliki legitimasi dan memperoleh banyak dukungan di antara penduduk lokal, tetapi juga hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tuntutan para pemilih atas jasa yang diberikan. Para penulis yang diilhami Migdal cenderung membingkai diskusi mereka dengan istilah “personalisme”, klientilisme, dan “hubungan patron klien” serta melukis orang kuat lokal sebagai penempatan peran patron yang memberi kebaikan personal bagi klien yang melarat dan para pengikut didaerah kekuasaan mereka.

Analisa Migdal, berdasarkan pada kondisi dan politik seperti munculnya kelompok-kelompok atau instusi informan di luar Negara yang mengurangi efektifitas dan kapabilitas Negara, di beberapa negara di dunia ketiga telah melahirkan orang-orang kuat tingkat lokal. Migdal menyebutkan orang kuat lokal dengan sebutan Local Strongman. Orang kuat lokal secara konsep jelasnya di definisikan sebagai kekuatan informal baik yang berupa tuan tanah, tengkulak, pengusaha kepala suku, panglima perang, bos petani kaya, pemimpin golongan dan lain sebagainya, yang berusaha memonopoli control atas masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu lewat kerjasama jejaring yang mereka bangun.

Otonomi yang dimiliki masyarakat diatur dan dikordinasikan oleh para pemimpin lokal yang ada. Pemimpin lokal inilah yang pada akhirnya menjadi kekuatan penentu. Para pemimpin lokal inilah yang pada akhirnya menjadi kekuatan penentu. Para pemimpin lokal ini pula yang menjadi local strongman. Migdal juga menjelaskan bahwa kunci kesuksesan local strongman bukan terletak pada kesuksesan

formal atau resmi yang diciptakan. Namun pada pengaruh yang dimiliki.

1.5.2 Modal

Menurut Bourdieu modal adalah akumulasi kerja yang memerlukan waktu untuk diakumulasikan. Untuk itu tidak cukup hanya memiliki satu modal saja dalam mendapatkan kepentingan, dibutuhkan adanya modal lain untuk saling melengkapi serta waktu dalam mereproduksi modal-modal tersebut menjadi alat kuasa. Modal berperan sebagai sebuah relasi sosial yang terdapat didalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang-baik materil maupun simbol, tanpa perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah informasi sosial tertentu. Semakin besar akumulasi modal yang dimiliki oleh seorang kandidat maka semakin besar pula dukungan yang diperoleh.

Dalam pertarungan/kompetisi setiap aktor/elit, modal (kapital) berperan penting dalam mempertahankan eksistensi aktor/elit dan bahkan memberikan kesempatan dalam merebut kemenangan atau mendapatkan apa yang diinginkan. Menurut Bourdieu terdapat empat tipe modal (*capital*) tersebut yakni:

1. Kapital ekonomi dimana seseorang harus memiliki harta benda, uang, kepemilikan dan sebagainya. Kapital ekonomi ini sangat mudah dikonversi menjadi kapital-kapital lainnya tergantung sang agen memanfaatkan modal ini dalam arena tertentu karena kapital ini merupakan sumber penghasilan atau finansial. Kehadiran kapital ini merupakan basis Marx mengelompokkan masyarakat berdasarkan kelas.
2. Kapital budaya/kultural terdiri dari bagaimana seseorang memanfaatkan informasi mengenai bentuk-bentuk kebudayaan, pengetahuan, memiliki strata pendidikan dan keterampilan. Wujud dari kapital budaya ini adalah berupa ijazah atas pendidikan yang ditempuh, kemudian ditambah dengan pengetahuan yang diperoleh, kemampuan menulis, serta gaya berbicara serta cara bergaul dengan lingkungan sosial dan pembawaannya dapat diperhitungkan dalam menentukan kedudukannya di lingkungan sosial.

3. Kapital simbolik ini berasal dari kehormatan yang didapatkan dari garis keturunan misalnya para darah biru atau bangsawan, modal simbolik ini mendapatkan tempat dan perhatian khusus di masyarakat sekitar karena memiliki perbedaan dari masyarakat lainnya. Namun meski kapital ini dapat diwariskan tetap butuh adanya legitimasi dari masyarakat untuk menghasilkan kekuasaan simbolik. Kapital yang dapat diwariskan ini merupakan kuasa genetis yang secara otomatis diperoleh, namun adapula kapital simbolik yang diperoleh berdasarkan hasil konversi dari kapital lainnya. Sementara itu modal simbolik atau dalam hubungannya dengan dinamika politik bisa dipahami sebagai besaran legitimasi, reputasi, dan tingkat penghormatan (respect) yang diperoleh oleh pelaku-pelaku politik ataupun lembaga lembaga politik akibat tindakan-tindakan politik yang dilakukan atau tidak dilakukannya.
4. Kapital sosial dapat dilihat bagaimana para aktor/elit ini membangun relasi-relasi dengan masyarakat tanpa ada sekat yang tentunya dapat dinilai orang sekitarnya serta mendapatkan penghargaan tertentu karena dapat membangun relasi sosial dengan baik. Menurut Bourdieu empat tipe kapital sosial: kemampuan kerja sama; budaya kerja sama melahirkan kepercayaan; mengandaikan pengakuan timbal balik (tidak hanya instrumental) potensi; fenomena struktural (interiorisasi nilai, pertukaran, solidaritas, kepercayaan berkat adanya sanksi/imbalan, pengawasan diri); tidak hanya kepercayaan tetapi juga bentuk dan struktur (Fitriani Sary, 2014).

Konsep modal dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Pierre Bourdieu yang memandang modal sebagai sumber daya yang dapat dikonversi dan digunakan aktor untuk memperoleh posisi dominan dalam suatu arena sosial. Modal tidak hanya terbatas pada kekayaan materi, tetapi mencakup berbagai bentuk sumber daya yang dapat diakumulasi, dipertukarkan, dan direproduksi menjadi kekuasaan. Dalam konteks politik lokal, kemampuan mengonversi modal ekonomi menjadi modal simbolik menjadi kunci bagi aktor untuk membangun pengaruh politik yang berkelanjutan.

Bourdieu membedakan modal ke dalam beberapa bentuk utama, yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Modal ekonomi mencakup kepemilikan uang, aset, dan

sumber daya material lainnya. Modal ini merupakan bentuk modal yang paling mudah dikenali dan paling fleksibel untuk dikonversi ke dalam bentuk modal lain. Namun, dalam praktik kekuasaan, modal ekonomi jarang bekerja secara langsung. Modal tersebut harus terlebih dahulu dilegitimasi secara sosial agar dapat berfungsi sebagai sumber pengaruh yang efektif.

Dalam konteks penelitian ini, juragan cengkeh memiliki modal ekonomi yang kuat melalui penguasaan modal produksi, akses pasar, dan jaringan distribusi cengkeh. Modal ekonomi ini digunakan juragan untuk memberikan bantuan kepada petani, seperti pemberian modal panen, penyediaan sarana produksi, pembiayaan tenaga kerja, serta bantuan kebutuhan sehari-hari. Pada tahap awal, bantuan tersebut tampak sebagai relasi ekonomi biasa. Namun, dalam praktik sosial, bantuan tersebut menjadi pintu masuk bagi proses konversi modal.

Modal ekonomi juragan yang digunakan secara berulang dan berjangka panjang menghasilkan modal sosial. Modal sosial terbentuk melalui relasi kepercayaan, kedekatan personal, dan jaringan hubungan yang terpelihara antara juragan dan petani. Ketika juragan secara konsisten membantu petani dalam situasi sulit, juragan dipandang sebagai figur yang dapat diandalkan. Kepercayaan ini tidak bersifat instan, tetapi dibangun melalui pengalaman sosial yang berulang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Modal sosial tersebut kemudian berkembang menjadi modal simbolik. Modal simbolik merujuk pada penghormatan, reputasi, dan legitimasi moral yang diberikan masyarakat kepada seorang aktor. Dalam kasus juragan cengkeh, modal simbolik muncul ketika bantuan ekonomi dan sosial tidak lagi dipersepsikan sebagai transaksi, melainkan sebagai kebaikan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Juragan dipandang sebagai tokoh yang berjasa, dermawan, dan layak dihormati. Pengakuan sosial ini membuat posisi juragan melampaui peran sebagai pedagang atau pelaku ekonomi semata.

Proses perubahan modal ekonomi menjadi modal simbolik tidak terjadi secara otomatis, tetapi dimediasi oleh norma sosial dan budaya lokal. Dalam masyarakat Bugis, nilai *Siri' na Pacce* memperkuat legitimasi simbolik juragan. Menghormati orang yang

telah berjasa dipandang sebagai bagian dari menjaga harga diri dan solidaritas sosial. Oleh karena itu, bantuan ekonomi yang diberikan juragan memperoleh makna simbolik yang kuat dan diinternalisasi sebagai kewajiban moral oleh masyarakat.

Modal simbolik inilah yang kemudian menjadi dasar terbentuknya model politik juragan cengkeh. Ketika juragan telah memperoleh legitimasi moral dan penghormatan sosial, arahan yang disampaikan juragan, termasuk dalam ranah politik, diterima sebagai nasihat yang patut diikuti. Pengaruh politik tidak dibangun melalui paksaan atau posisi formal, tetapi melalui kewibawaan simbolik yang telah terakumulasi dari praktik ekonomi dan sosial sebelumnya.

Dalam konteks politik lokal, khususnya pada Pilkada Kabupaten Wajo 2024, modal simbolik juragan berfungsi sebagai sumber daya politik yang sangat efektif. Kandidat kepala daerah cenderung mendekati juragan karena juragan memiliki legitimasi sosial dan kemampuan mengarahkan preferensi politik masyarakat. Dengan demikian, modal ekonomi juragan tidak berhenti sebagai kekuatan materi, tetapi mengalami transformasi menjadi modal simbolik yang mampu dimobilisasi dalam arena politik.

Berdasarkan kerangka ini, modal dalam penelitian ini dipahami sebagai proses yang dinamis. Modal ekonomi juragan dikonversi menjadi modal sosial melalui relasi patronase, kemudian berkembang menjadi modal simbolik berupa penghormatan dan legitimasi moral. Modal simbolik tersebut selanjutnya berfungsi sebagai modal politik yang memungkinkan juragan cengkeh berperan sebagai aktor berpengaruh dalam politik lokal tanpa harus menduduki jabatan formal. Proses inilah yang menjelaskan bagaimana kekuasaan ekonomi dapat bertransformasi menjadi kekuasaan politik dalam konteks masyarakat agraris di Kabupaten Wajo.

1.5.3 Pengaruh Juragan Cengkeh Dalam Politik Lokal

Kekuasaan ekonomi yang dimiliki oleh juragan cengkeh sering kali berlanjut ke ranah politik. Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Wajo, juragan cengkeh memiliki peran penting sebagai pendukung utama bagi calon-calon tertentu. Dukungan ini tidak hanya diberikan dalam bentuk dana kampanye,

tetapi juga melalui mobilisasi massa dan pengaruh sosial yang mereka miliki.

Sebagai tokoh ekonomi yang dihormati, juragan cengkeh sering kali menjadi jembatan antara kandidat politik dengan masyarakat. Mereka menggunakan pengaruh mereka untuk membangun citra positif bagi kandidat yang didukung, baik melalui kampanye langsung maupun penyampaian pesan secara informal di kalangan petani dan pekerja mereka. Tidak jarang, bantuan ekonomi seperti bantuan langsung tunai diberikan kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi politik untuk memperoleh dukungan. Namun, pengaruh politik juragan cengkeh juga menimbulkan tantangan. Dalam beberapa kasus, dominasi mereka dapat mengurangi persaingan politik yang sehat. Kandidat yang tidak mendapatkan dukungan dari juragan cengkeh sering kali kesulitan untuk bersaing, terutama dalam menggalang dukungan dari masyarakat yang secara ekonomi bergantung pada juragan tersebut.

1.5.4 Dinamika Sosial-Politik di Kabupaten Wajo

Keterlibatan juragan cengkeh dalam politik lokal di Kabupaten Wajo mencerminkan hubungan erat antara kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik. Di satu sisi, kehadiran mereka membantu memperkuat basis ekonomi masyarakat dan menciptakan stabilitas sosial. Namun, di sisi lain, dominasi mereka dalam ranah politik dapat menimbulkan ketimpangan, di mana proses demokrasi menjadi kurang inklusif.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menciptakan keseimbangan antara peran ekonomi dan politik juragan cengkeh. Apakah pengaruh mereka seharusnya dibatasi untuk menjaga independensi proses politik, atau justru dimanfaatkan sebagai aset lokal yang mendukung pembangunan daerah? Pertanyaan ini menjadi refleksi penting bagi masyarakat Wajo dalam memahami dinamika lokal mereka. Kiprah juragan cengkeh di Kabupaten Wajo tidak hanya menjadi cerita tentang keberhasilan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana aktor-aktor lokal memainkan peran kunci dalam membentuk tatanan sosial dan politik. Mereka adalah gambaran nyata dari hubungan saling

ketergantungan antara ekonomi, politik, dan masyarakat di daerah agraris seperti Wajo.

1.6 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Kajian	Metode Penelitian	Temuan Utama
1	Nur Holifah; 2012	Kekuatan Local Strongman dalam Pilkada Sampang	Peran local strongman dalam mempengaruhi Pilkada melalui kekerasan, intimidasi, dan sumbangan sosial	Studi kepustakaan atau literature review	Local strongman membangun kekuasaan melalui kekerasan dan tekanan sosial. Negara menjadi wahana dominasi kekuasaan. Nilai demokrasi langsung, bebas, jujur, dan adil sering terabaikan.
2	Nur Aliyah Zainal, Ibnu Khaldun: 2015	Local Strongman dan Kontestasi Politik Studi Terhadap Kemenangan Aras Tammauni dan Muh	Strategi local strongman melalui kampanye persuasif dan sinergi elit lokal serta pengusaha	Studi kepustakaan dari jurnal, artikel, buku, dan sumber daring	Kemenangan kandidat didukung jaringan local strongman dan pengusaha lokal. Local strongman mampu mengatur

		Amin Jasa pada Pilkada Mamuju Tengah			sinergi kepentingan elit untuk memenangkan kontestasi politik.
3	Tito Handoko, Ramlan Darmansyah, dan Syofian; 2020	Fenomena Local Strongman Studi Kasus Pengaruh Sukarmis dalam Mendukung Kemenangan Andi Putra sebagai DPRD Kuantan Singingi	Peran local strongman di dalam dan di luar struktur birokrasi, politik, dan pengusaha	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur	Local strongman tidak hanya berada di luar struktur formal. Mereka mampu berperan di birokrasi, politik, dan dunia usaha secara bersamaan untuk mempengaruhi hasil politik.
4	Nur Rohman; 2016	Peran Local Strongman dalam Politik Lokal Studi Kasus Pilkada di Jawa Timur	Peran orang kuat lokal dalam mobilisasi dukungan politik dan kontrol sosial	Penelitian kualitatif deskriptif	Local strongman memanfaatkan jaringan sosial, ekonomi, dan kedekatan kultural untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat.

5	Muhammad Fajar dan Syaiful Anwar; 2019	Patronase Politik dan Relasi Kekuasaan Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah	Hubungan patron-klien antara elite lokal dan pemilih	Penelitian kualitatif dengan wawancara dan studi dokumen	Patronase ekonomi bertransformasi menjadi loyalitas politik dan mempengaruhi kualitas demokrasi lokal.
6	Edward Aspinall; 2014	When Brokers Betray Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia	Broker politik dan klientelisme elektoral	Kualitatif	Broker lokal menjadi aktor kunci mobilisasi suara melalui jaringan sosial.
7	Marcus Mietzner; 2015	Dysfunction by Design Political Finance and Corruption in Indonesia	Oligarki dan pembiayaan politik	Kualitatif	Aktor ekonomi lokal memiliki pengaruh besar dalam kontestasi politik.
8	Vedi R. Hadiz; 2010	Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia	Oligarki lokal dan desentralisasi	Analisis politik ekonomi	Desentralisasi memperkuat orang kuat lokal berbasis ekonomi.

9	Paul Hutchcroft; 2014	Oligarchs and Cronies in the Philippine State	Patronase dan oligarki lokal	Studi komparatif	Penguasaan ekonomi menjadi basis kontrol politik lokal.
1 0	Göran Therborn; 2018	Inequality and the Dynamics of Power	Modal dan kekuasaan	Teoretis	Ketimpangan ekonomi memperkuat dominasi politik aktor lokal.

1.7 Kerangka Berpikir

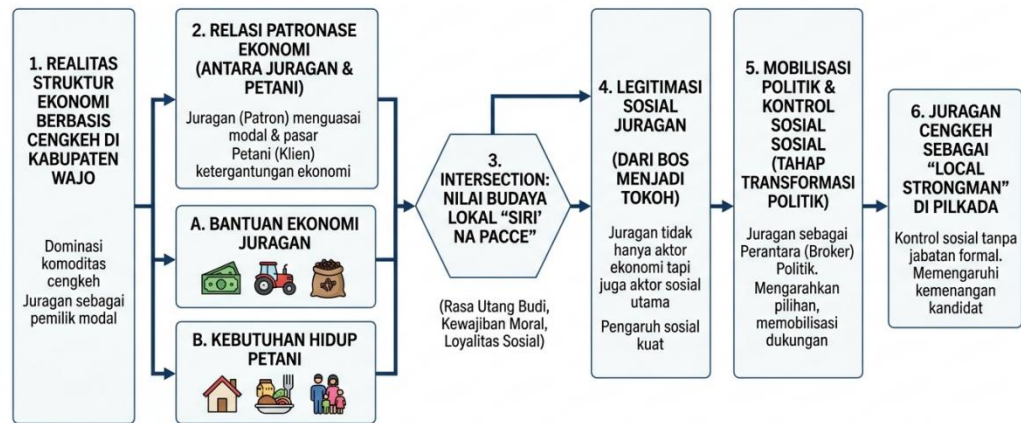
Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari realitas bahwa struktur ekonomi berbasis komoditas cengkeh di Kabupaten Wajo membentuk relasi patronase antara juragan cengkeh dengan petani dan pekerja. Juragan cengkeh tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat. Melalui penguasaan modal dan akses pasar, juragan memberikan berbagai bentuk bantuan kepada petani, seperti pembiayaan produksi, kebutuhan hidup, serta dukungan dalam aktivitas pertanian. Praktik ini kemudian berkembang menjadi hubungan yang lebih dari sekadar ekonomi, karena di dalamnya terbentuk relasi sosial yang erat dan berkelanjutan. Hubungan tersebut melahirkan ketergantungan ekonomi di kalangan petani yang secara perlahan berubah menjadi loyalitas sosial. Bantuan yang diberikan oleh juragan tidak hanya dipandang sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian yang menimbulkan rasa utang budi. Dalam konteks budaya lokal, nilai *siri'* na *pacce* memperkuat ikatan tersebut, sehingga masyarakat merasa memiliki kewajiban moral untuk menjaga hubungan baik dan membalas kebaikan yang telah diterima. Pada tahap ini, juragan tidak hanya memiliki modal ekonomi, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat.

Legitimasi sosial tersebut kemudian menjadi dasar bagi transformasi patronase ekonomi ke dalam ranah politik. Juragan cengkeh mulai

berperan dalam mengarahkan pilihan politik masyarakat, baik melalui komunikasi langsung, pengaruh sosial, maupun tekanan terselubung yang muncul dari relasi ketergantungan yang telah terbentuk sebelumnya. Dalam proses ini, juragan juga berfungsi sebagai perantara antara kandidat politik dan masyarakat, sehingga memiliki posisi strategis dalam memobilisasi dukungan politik.

Pengaruh yang dimiliki tidak lagi bersifat ekonomi semata, melainkan telah berkembang menjadi kekuatan politik yang nyata. Dengan kondisi tersebut, juragan cengkeh tampil sebagai aktor informal yang memiliki kontrol sosial yang kuat dan mampu memengaruhi perilaku politik masyarakat tanpa harus berada dalam struktur kekuasaan formal. Posisi ini menempatkan mereka sebagai local strongman yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan kepentingan ekonomi dan politik sekaligus mengarahkan dukungan masyarakat dalam kontestasi Pilkada. Pada akhirnya, keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa patronase ekonomi yang dibangun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat bertransformasi menjadi kekuatan politik yang efektif dalam menentukan arah dukungan dan berkontribusi terhadap kemenangan kandidat dalam Pilkada di Kabupaten Wajo.

SKEMA KERANGKA BERPIKIR: TRANSFORMASI PATRONASE EKONOMI JURAGAN CENGKEH MENJADI KEKUATAN POLITIK DI KABUPATEN WAJO



Gambar 1. Kerangka Pikir

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu

Penelitian tentang patronase ekonomi dan politik lokal (Pengaruh Juragan Cengkeh) pada Pilkada Kabupaten Wajo dilakukan di Kecamatan Pitumpanua, lokasi tersebut dipilih sebagai objek karena adanya pengaruh dari beberapa pengusaha (juragan cengkeh).

2.2 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai patronase ekonomi dan politik (pengaruh juragan cengkeh) di Kabupaten Wajo. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Kabupaten Wajo, termasuk relasi patron-klien yang terjalin antara juragan cengkeh dan Masyarakat, serta pengaruhnya terhadap proses politik. Pendekatan deskriptif-analisis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena hubungan kekuatan ekonomi dan sosial yang dimiliki oleh juragan cengkeh dalam memobilisasi massa dalam mendukung kandidat politik lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak kekuatan local terhadap dinamika demokrasi local di Kabupaten Wajo.

2.3 Sumber Data

Sugiyono (2019) bila dilihat dari jenis dan sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara yaitu catatan atau rekaman audio/video dari percakapan langsung antar peneliti dan subjek peneliti.

2. Data Sekunder

Adalah data yang tidak langsung diperoleh penulis dari responden, melainkan data diperoleh dari pihak lain seperti sumber pustaka organisasi mengenai sejarah organisasi yang penulis teliti.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Interview (Wawancara)

Suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab yang berkaitan dengan objek penelitian atau juga melihat-lihat materi-materi wawancara dengan responden yang terkait yang dianggap mampu memberikan data-data atau informasi yang akurat. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, teknik ini paling luas digunakan untuk memperoleh informasi dari responden atau informan. (Saludin., 2009), (Sari, D. M., & Yulianto, A. (2022).

2.5 Teknik Analisis Data

Riset ini menerapkan metode penelitian kualitatif, yang berfokus pada pengumpulan data secara deskriptif untuk memahami fenomena sosial yang sedang diteliti. Penelitian ini akan mencakup penjelasan baik secara lisan maupun tulisan dari para informan. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data kualitatif sebagai berikut :

1. Reduksi data, merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
2. Penyajian data, adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif, matriks, grafik, dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan, merupakan hasil analisis yang digunakan untuk mengambil tindakan.